

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Istilah Pemberdayaan sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena saat ini hal tersebut sudah banyak diwujudkan dalam bentuk program atau kegiatan secara institusional maupun oleh lembaga-lembaga non pemerintah dengan objek yaitu masyarakat dan merupakan elemen penting dalam proses pembangunan dan penyadaran pembangunan terhadap kesadaran dan keberdayaan masyarakat. Adapun beragam pengertian tentang pemberdayaan, diantaranya menurut Wuradji Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Kemudian, menurut Edi Suharto (2010) dalam (Lestari, 2019. hlm 13), “Pemberdayaan adalah proses dan tujuan”. Dimana sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupannya.

Winarmi dalam Suryana (2010) dalam (Lestari, 2019. hlm 16) mengungkapkan bahwa “Inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian”. Oleh karena itu, umumnya sasaran dari pemberdayaan biasanya masyarakat yang tergolong masih atau belum berdaya secara material maupun non material agar dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki hingga masyarakat menjadi mandiri. Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan daya dengan proses perubahan sosial yang memiliki tujuan memperkuat kelompok masyarakat yang lemah dalam segi kualitas hidup menjadi berdaya melalui

berbagai kegiatan melalui motivasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, menggali serta mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

2.1.2 Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pada umumnya dapat difahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan. Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) bertindak atau sebagai acuan dalam sebuah proses dan sebagai target capaian. Menurut Mathew dalam (Lestari, 2019. hlm 16) “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Oleh Karena itu, prinsip akan berlaku secara umum, dapat diterima secara umum sehingga prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun menurut Najiati (2005 : 54) dalam (Lestari, 2019. hlm 17) terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan, yaitu :

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Sehingga terjadi proses pembelajaran.

2) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tahap tersebut memerlukan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian Prinsip Keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak

lain. Konsep ini tidak memandang orang tidak mampu sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit.

4) Prinsip Berkelanjutan Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya para pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Namun, secara perlahan dan pasti peran pendamping akan semakin berkurang bahkan hilang karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.1.3 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Terkait dengan hal ini, pembangunan merujuk pada upaya perbaikan terutama perbaikan mutu hidup manusia baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budaya. Menurut Mardikanto (2013: 109) dalam (Lestari, 2019. hlm 18) , terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Perbaikan Kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 2) Perbaikan Usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 3) Perbaikan Pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 4) Perbaikan Lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 5) Perbaikan Kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6) Perbaiki masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.1.4 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

2.1.4.1 Pengertian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Menurut (Kementerian Dalam Negeri. 2013), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) didefinisikan sebagai gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. (Rahmawati. D, 2017. hlm 57) mendefinisikan PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia melalui program-program yang terencana dan terstruktur. Konsep Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu sebuah organisasi yang melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program- program pemerintah.

Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan dengan program-program pemerintah. PKK yang merekrut anggota sampai lapisan bawah masyarakat diharapkan mampu membawa pada kondisi keluarga yang sejahtera, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara material, sosial, mental dan spiritual serta keluarga yang berdaya yaitu keluarga yang hidup sejahtera, maju dan mandiri. Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan perempuan dari belenggu budaya patriarki, sehingga memiliki kemandirian. Melalui PKK

diharapkan harkat dan martabat perempuan sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan. Namun, pada kenyataannya PKK belum sepenuhnya mampu merubah kondisi keluarga dan perempuan, sehingga belum terwujud kesetaraan dan keadilan gender (Nurhayati, N. 2018. hlm 154).

2.1.4.2 Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Ima wati dalam (Yunitasari, 2019. hlm 20) menjelaskan bahwa peranan PKK merupakan tindakan yang dilakukan melalui berbagai macam kegiatan keterampilan yang banyak dilakukan mulai dari hidup sehat, pendidikan keluarga yang dimulai dari terbawah rumah tangga (RT) hingga Desa dan Kelurahan. Peran PKK sangat penting bagi Pemerintahan karena merupakan penegak utama antara Negara dan perempuan. PKK bahkan bertugas untuk sebagai mitra Pemerintah yang berperan dan bertujuan sebagai pembantu pemerintah dalam usaha pembangunan. Bahkan dalam struktur organisasi berada dibawah naungan Departemen Dalam Negeri , dan ketuanya di tingkat Desa adalah istri Kepala Desa.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah Ima wati dalam (Yunitasari, 2019. hlm 20). Peranan PKK tersebut sejalan dengan visi dan misi PKK, dan didukung dengan sepuluh program pokok yang dimiliki PKK, dan didukung dengan sepuluh program pokok yang dimiliki PKK, kemudian lebih dikenal sebagai “Sepuluh Program Pokok PKK”. Kesepuluh program pokok tersebut adalah: (1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila; (2) Gotong royong; (3) Pangan; (4) Sandang; (5) Perumahan dan tata laksana rumah tangga; (6) Pendidikan dan ketrampilan; (7) Kesehatan; (8) Pengembangan kehidupan koperasi; (9) Kelestarian lingkungan hidup; (10) Perencanaan sehat. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah melakukan berbagai upaya signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemberdayaan perempuan dan keluarga. Teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Edi Suharto dalam (Yunitasari, 2019. hlm 20) menjadi landasan yang relevan untuk memahami peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Suharto dalam (Yunitasari, 2019. hlm 20) mendefinisikan pemberdayaan sebagai serangkaian kegiatan untuk

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Berdasarkan teori Suharto dalam (Yunitasari, 2019. hlm 21), terdapat lima indikator pendekatan pemberdayaan yang dapat digunakan untuk menganalisis peran PKK:

a. Pemungkinan (*Enabling*)

PKK berperan dalam menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat, khususnya keluarga dan perempuan, untuk berkembang secara optimal. Ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang membuka akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Misalnya, PKK mengadakan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi lokal, seperti kerajinan tangan atau pengolahan makanan khas daerah. Dalam konteks penghapusan hambatan, PKK berupaya mengatasi kendala struktural dan kultural yang menghambat pemberdayaan perempuan dan keluarga. Ini termasuk mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan gender, mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas, dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga.

b. Penguatan (*Empowering*)

PKK memainkan peran krusial dalam penguatan kapasitas anggota masyarakat. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, PKK meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan keluarga. Ini mencakup pelatihan manajemen keuangan keluarga, pendidikan kesehatan reproduksi, atau kursus kewirausahaan. Selain itu, PKK juga fokus pada penguatan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah. Ini dilakukan melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi pemecahan masalah yang berkaitan dengan isu-isu kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, anggota masyarakat tidak hanya dibekali dengan pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis dalam menghadapi tantangan sehari-hari.

c. Perlindungan (*Protecting*)

Dalam aspek perlindungan, PKK berperan sebagai advokat bagi kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. PKK aktif dalam kampanye penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hak-hak anak. Ini dilakukan melalui edukasi masyarakat, pembentukan sistem pelaporan, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. PKK juga berupaya menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi dan dominasi dalam masyarakat. Ini termasuk mendorong partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan masyarakat, serta memastikan akses yang adil terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

d. Penyokongan (*Supporting*)

PKK berperan sebagai sistem pendukung bagi keluarga dan masyarakat. Melalui struktur organisasinya yang tersebar hingga tingkat RT/RW, PKK memberikan bimbingan dan dukungan langsung kepada keluarga-keluarga. Ini bisa berupa konseling keluarga, pendampingan usaha kecil, atau dukungan emosional bagi keluarga yang menghadapi masalah. Dalam menciptakan kesempatan pemecahan masalah, PKK mengorganisir forum-forum diskusi masyarakat. Di sini, warga dapat berbagi pengalaman, mengidentifikasi masalah bersama, dan merumuskan solusi kolektif. PKK juga memfasilitasi akses terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk mengatasi masalah, seperti menghubungkan dengan lembaga keuangan mikro atau layanan konsultasi hukum.

e. Pemeliharaan (*Fostering*)

Peran PKK dalam pemeliharaan fokus pada upaya menjaga kondisi yang kondusif bagi pemberdayaan berkelanjutan. Ini melibatkan pelestarian nilai-nilai positif dalam masyarakat, seperti gotong royong dan kearifan lokal, yang mendukung kesejahteraan keluarga. PKK juga aktif dalam program-program pelestarian lingkungan, yang penting untuk menjamin kualitas hidup jangka panjang.

Dalam konteks distribusi kekuasaan, PKK berupaya memastikan bahwa semua anggota masyarakat, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, memiliki suara dalam pengambilan keputusan komunitas. Ini dilakukan melalui rotasi kepemimpinan dalam struktur PKK, serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai

lapisan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan lokal. Melalui implementasi kelima indikator pemberdayaan ini, PKK menjalankan perannya sebagai agen pemberdayaan yang komprehensif. PKK tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan material keluarga, tetapi juga pada pengembangan kapasitas, perlindungan hak, dan penciptaan lingkungan yang mendukung untuk pemberdayaan berkelanjutan.

2.1.4.3 Upaya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah menunjukkan peran signifikan dalam upaya mengatasi stereotip gender dan mempromosikan kesetaraan di Indonesia. Peneliti dalam prosesnya menggunakan teori Peran Sosial (*Social Role Theory*) yang dikemukakan oleh Alice H. Eagly dan Wendy Wood (Eagly, A. H., & Wood, W, 2012. hlm 465). Teori ini sangat relevan karena berfokus pada bagaimana peran sosial membentuk dan mempengaruhi stereotype gender, serta bagaimana perubahan peran dapat mengatasi stereotype tersebut. Dalam teori peran sosial ini akan mengkaji secara mendalam melalui 5 indikator yaitu Pembagian Peran Sosial (*Division of Social Roles*), Ekspektasi Perilaku Berbasis Gender (*Gender-Based Behavioral Expectations*), Sosialisasi Peran Gender (*Gender Role Socialization*), Fleksibilitas Peran Gender (*Gender Role Flexibility*), Perubahan Sosial dan Peran Gender (*Social Change and Gender Roles*).

a. Pembagian Peran Sosial (*Division of Social Roles*)

Teori peran sosial yang dikembangkan oleh Alice Eagly memberikan wawasan berharga tentang bagaimana stereotip gender terbentuk dan bertahan dalam masyarakat. Salah satu aspek kunci dari teori ini adalah konsep Pembagian Peran Sosial (*Division of Social Roles*), yang menjelaskan bagaimana masyarakat cenderung membagi peran dan tanggung jawab berdasarkan jenis kelamin. Pemahaman ini dapat menjadi landasan penting bagi upaya PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam mengatasi stereotip gender di masyarakat. Menurut Eagly, stereotip gender muncul sebagai hasil dari observasi masyarakat terhadap peran-peran yang umumnya dijalankan oleh laki-laki dan perempuan. Misalnya, ketika masyarakat sering melihat perempuan dalam peran pengasuh anak dan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, mereka cenderung mengembangkan keyakinan

bahwa perempuan secara alamiah lebih nurturing dan laki-laki lebih berorientasi pada karir. PKK dapat memanfaatkan pemahaman ini untuk merancang program-program yang menantang pembagian peran tradisional tersebut. Adapun sub indikator dalam indikator pembagian peran sosial yaitu peran produktif, peran reproduktif, peran komunitas, peran strategis, peran adaptif.

b. Ekspektasi Perilaku Berbasis Gender (*Gender-Based Behavioral Expectations*)

Salah satu aspek penting dari teori ini adalah konsep Ekspektasi Perilaku Berbasis Gender (*Gender-Based Behavioral Expectations*), yang menjelaskan bagaimana masyarakat mengembangkan harapan tertentu tentang perilaku yang dianggap "sesuai" untuk laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam merancang strategi untuk mengatasi stereotip gender di masyarakat. Menurut Eagly, ekspektasi perilaku berbasis gender terbentuk melalui proses sosialisasi yang berlangsung sejak usia dini. Masyarakat cenderung mengharapkan perempuan untuk bersikap lebih nurturing, empatik, dan berorientasi pada hubungan interpersonal, sementara laki-laki diharapkan untuk lebih asertif, mandiri, dan berorientasi pada pencapaian. Ekspektasi ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana individu berperilaku, tetapi juga bagaimana mereka dinilai oleh orang lain dan bagaimana mereka menilai diri sendiri. PKK dapat memanfaatkan pemahaman ini untuk merancang program-program yang menantang ekspektasi perilaku berbasis gender yang sudah mengakar. Misalnya, PKK bisa menyelenggarakan lokakarya dan diskusi kelompok yang membahas asal-usul ekspektasi ini dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Adapun sub indikator dalam ekspektasi perilaku berbasis gender yaitu karakteristik komunal, karakteristik *agentic*, ekspektasi kompetensi.

c. Sosialisasi Peran Gender (*Gender Role Socialization*)

Salah satu aspek kunci dari teori ini adalah konsep Sosialisasi Peran Gender (*Gender Role Socialization*), yang menjelaskan proses dimana individu mempelajari dan menginternalisasi perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang dianggap sesuai dengan gender mereka dalam konteks budaya tertentu. Pemahaman ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

dalam merancang strategi untuk mengatasi stereotip gender di masyarakat. Menurut Eagly, sosialisasi peran gender dimulai sejak usia dini dan berlangsung sepanjang hidup melalui berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media. Proses ini membentuk pemahaman individu tentang apa yang diharapkan dari mereka sebagai laki-laki atau perempuan, dan sering kali memperkuat stereotip gender yang ada. PKK dapat memanfaatkan pemahaman ini untuk merancang program-program yang secara aktif menantang dan mengubah proses sosialisasi peran gender yang bias. Salah satu cara PKK dapat mengaplikasikan teori ini adalah dengan fokus pada pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Mengingat keluarga adalah agen sosialisasi primer, PKK dapat menyelenggarakan workshop dan sesi konseling untuk orang tua, membantu mereka memahami bagaimana praktik pengasuhan mereka dapat mempengaruhi persepsi anak tentang peran gender. PKK dapat mendorong orang tua untuk menerapkan pola asuh yang lebih netral gender, misalnya dengan memberikan anak-anak akses ke berbagai jenis mainan dan aktivitas tanpa memandang gender mereka, atau dengan membagikan tugas rumah tangga secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Adapun sub indikator dalam sosialisasi peran gender yaitu agen sosialisasi, konten sosialisasi, mekanisme sosialisasi.

d. Fleksibilitas Peran Gender (*Gender Role Flexibility*)

Teori peran sosial yang dikembangkan oleh Alice Eagly menyoroti pentingnya Fleksibilitas Peran Gender, dalam pembentukan dan pelestarian stereotip gender di masyarakat. Konsep ini menjelaskan bagaimana individu, sejak usia dini, mempelajari dan menginternalisasi perilaku, sikap, dan ekspektasi yang dianggap sesuai dengan gender mereka melalui berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media. Pemahaman mendalam tentang proses ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam merancang strategi efektif untuk mengatasi stereotip gender di masyarakat. PKK dapat memanfaatkan wawasan dari teori Eagly ini dengan fokus pada transformasi proses Fleksibilitas Peran Gender di berbagai tingkatan masyarakat. Dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga, PKK dapat mengembangkan program-program yang memberdayakan orang tua untuk menjadi agen perubahan. Melalui

workshop dan sesi konseling, PKK dapat membantu orang tua memahami dampak jangka panjang dari praktik pengasuhan yang bias gender dan mendorong mereka untuk menerapkan pendekatan yang lebih netral gender dalam membesarkan anak-anak mereka. Ini bisa meliputi dorongan untuk memberikan anak-anak akses ke beragam mainan dan aktivitas tanpa memandang gender, serta pembagian tugas rumah tangga yang setara antara anak laki-laki dan perempuan. Sub indikatornya pembagian tanggung jawab, kebebasan pemilihan karir dan pendidikan.

e. *Perubahan Sosial dan Peran Gender (Social Change and Gender Roles).*

Salah satu aspek penting dari teori ini adalah konsep Perubahan Sosial dan Peran Gender, yang menjelaskan bagaimana perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan teknologi dapat mempengaruhi ekspektasi dan perilaku terkait gender. Pemahaman ini menjadi landasan yang kuat bagi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam merancang strategi jangka panjang untuk mengatasi stereotip gender di masyarakat. Eagly berpendapat bahwa peran gender tidak statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial. Misalnya, masuknya perempuan ke dalam angkatan kerja secara masif telah mengubah persepsi tentang kemampuan dan peran perempuan dalam masyarakat. PKK dapat memanfaatkan pemahaman ini untuk merancang program-program yang tidak hanya merespons stereotip gender yang ada, tetapi juga secara aktif mendorong perubahan sosial yang mendukung kesetaraan gender. Sub indikatornya dinamisme peran sosial, agen perubahan sosial.

2.1.5 Stereotip Gender

2.1.5.1 Pengertian Stereotip Gender

Menurut Moser (dalam Evisetiawati, 2024, hlm. 14), stereotip gender adalah asumsi yang meliputi nilai, keyakinan gambaran mental yang mengidentifikasi norma sosial tertentu yang berdasarkan pada jenis kelamin. Stereotip gender sering memandang gender sebagai satu-satunya sumber ideologi seorang. Stereotip gender adalah cara pandang yang umum di masyarakat yang cenderung menempatkan unsur-unsur dalam hubungan hierarkis. Pandangan ini mencakup generalisasi tentang harapan-harapan terkait aktivitas, kemampuan, atribut, dan pilihan yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin seseorang Riswani dalam (Evisetiawati,

2024. hlm 14). Sedangkan pandangan dari Bem dalam (Evisetiwati, 2024. hlm 14) stereotip gender merujuk pada keyakinan dan harapan yang ada dalam budaya mengenai bagaimana lakilaki dan perempuan seharusnya berperilaku, seperti karakteristik, minat, dan peran yang dianggap "cocok" untuk masing-masing jenis kelamin. Menurut Taylor dalam (Setiawati, 2024. hlm 62) sendiri stereotip gender ialah pandangan umum dari masyarakat yang lebih fokus kepada peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. laki-laki di dalam gambaran masyarakat memiliki ciri maskulin, tenaganya besar, dan berpikir menggunakan logika. Sedangkan perempuan menggunakan perasaan, kasih sayang, dan feminin dalam penampilan. Keyakinan tentang atribut personal pria dan wanita disebut gender stereotip Deaux & Kite dalam (Setiawati, 2024. hlm 62). Stereotipe gender dapat mencakup pandangan tentang kepribadian, minat, kemampuan, dan tanggung jawab yang diatribusikan kepada pria dan wanita Taylor, dkk dalam (Setiawati, 2024. hlm 58).

Menurut Narwoko dan Suyanto dalam (Fanny, 2023. hlm 36) stereotip merupakan pelabelan terhadap pihak atau kelompok tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan adanya ketidakadilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa stereotip yaitu suatu persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu terbentuk. Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif bahkan merendahkan orang lain. Menurut Suyanto dalam (Fanny, 2023. hlm 37) proses stereotipisasi terhadap diri seseorang tidak hadir begitu saja ketika seorang manusia sudah dewasa, tetapi berlangsung sejak dini yang dilakukan oleh orangtua dan lingkungannya. Perbedaan pemberian permainan kepada anak-anak misalnya, sejak awal sudah terjadi diferensiasi. Orang tua ketika membelikan mainan kepada anak laki-lakinya berupa mobil-mobilan, pistol-pistolan, dan sejenisnya. Tetapi permainan untuk anak perempuan berupa boneka, bunga-bunga, alat memasak, dan sebagainya. Menurut Rahmadhani (2020. hlm 218) stereotip gender adalah keyakinan dari seseorang berkaitan dengan perilaku yang tepat untuk laki-laki dan perempuan. Keyakinan tersebut berupa pelabelan dan nilai-nilai yang telah lama terbentuk di masyarakat berdasarkan maskulin dan feminis. Stereotip gender laki-laki diwujudkan dalam maskulinitas, sedangkan pada perempuan diwujudkan

dalam feminitas. stereotip gender telah lama menjadi fokus penelitian dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, dan studi gender. Fenomena ini merujuk pada keyakinan dan ekspektasi yang digeneralisasi mengenai karakteristik, perilaku, dan peran yang sesuai untuk laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Ellemers, 2018. hlm 280).

Begitu banyak ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, terutama perempuan yang bersumber dari penandaan (stereotip) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan yang bersolek adalah untuk memancing perhatian lawan jenisnya, maka ketika ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini. Bahkan jika perempuan mengalami pemerkosaan, masyarakat cenderung menyalahkan perempuan sebagai korban. Masyarakat juga beranggapan bahwa melayani suami adalah tugas utama perempuan. Dengan adanya stereotip ini menjadikan pendidikan sebagai nomor dua bagi kaum perempuan. Stereotip seperti ini telah terjadi dimana-mana, yang mengakibatkan banyaknya peraturan pemerintah, keagamaan, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena adanya stereotip tersebut. Masyarakat yang menganut sistem patriarki melihat perbedaan gender sebagai kodrat Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan.

Menurut Fakhri dalam (Fanny, 2023. hlm 40) menyatakan bahwa hal ini telah menyebabkan ketidakadilan gender. Laki-laki maupun perempuan adalah korban dari ketidakadilan tersebut. Hal ini karena setiap gender memiliki karakteristik yang ditentukan oleh masyarakat. Anggapan bahwa perempuan itu lemah, lembut, halus, sensitif dan memiliki sifat-sifat feminim lainnya mengarah pada kenyataan bahwa perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Stereotip gender berakar pada konstruksi sosial dan budaya yang telah berkembang sepanjang sejarah manusia. Menurut (Eagly dan Wood. 2012. hlm 458), "Stereotip gender muncul dari pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yang telah lama ada dalam masyarakat, yang kemudian membentuk keyakinan tentang atribut laki-laki dan perempuan". Proses ini diperkuat melalui berbagai mekanisme sosialisasi, termasuk keluarga, pendidikan, media, dan institusi sosial lainnya. Perkembangan

stereotip gender juga dipengaruhi oleh faktor biologis dan evolusi. (Schmitt et al, 2017) menyatakan dalam (priyashantha, 2023. hlm 457) bahwa "perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan, meskipun sebagian besar kecil hingga sedang dalam besarnya, konsisten secara lintas budaya dan dapat dijelaskan sebagian oleh pengaruh evolusi". Namun, penting untuk dicatat bahwa pengaruh biologis ini tidak deterministic dan seringkali berinteraksi dengan faktor lingkungan dan budaya.

Berdasarkan beberapa ahli di atas maka stereotip gender adalah suatu pandangan masyarakat yang mengategorikan orang-orang berdasarkan jenis kelamin. Stereotipe ini muncul karena adanya kebiasaan yang telah berakar sejak lama. Kebiasaan ini kemudian diterima oleh masyarakat dan menjadi bagian dari budaya mereka.

2.1.5.2 Bentuk Stereotip Gender

Stereotip Pemahaman bahwa diri sebagai laki-laki atau perempuan (identitas gender) telah didapatkan sejak dini. Sekitar usia 2 tahun telah menyadari gender nya dan dapat memberi tahu orang tuanya bahwa dirinya laki-laki ataupun perempuan Taylor, dkk dalam (Evisetiawati, 2024. hlm 14). Menurut Bem dalam (Evisetiawati, 2024. hlm 14) perbedaan antara laki-laki dan perempuan berfungsi sebagai prinsip dasar untuk memberikan tugas. Masyarakat memberikan peran orang dewasa berdasarkan jenis kelamin dan mensosialisasikan kepada anak mereka. Menurut Taylor, dkk dalam (Evisetiawati, 2024. hlm 14) penjelasan yang lengkap tentang perbedaan peran gender harus mempertimbangkan kapasitas biologis, lingkungan sosial tempat tinggal, serta interaksi antar biologi dan kultur. Konsep peran gender diperkenalkan oleh Harvard yang membagi peran gender ke dalam dua kategori, yaitu peran produktif dan peran reproduktif. Konsep tersebut kemudian dilengkapi oleh Moser dalam (Evisetiawati, 2024. hlm 14) yang menambahkan bahwa selain peran produktif dan peran reproduktif, juga dikenal peran kemasyarakatan. Moser dalam (Evisetiawati, 2024. hlm 14) mengidentifikasi "*The Triple Roles*", yaitu peran reproduktif, peran produktif, dan peran pengelolaan masyarakat/ komunitas. Berikut penjelasannya peran gender dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya:

a. Peran reproduktif

Menurut Moser peran reproduktif merupakan peran yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan rumah tangga dan anggotanya, termasuk melahirkan dan merawat anak-anak, menyiapkan makanan, mengumpulkan air dan bahan bakar, berbelanja, mengurus rumah, dan perawatan kesehatan keluarga. Peran reproduktif ini biasanya tidak dibayar dan tidak dihitung dalam statistik ekonomi konvensional. Peran ini banyak dilakukan oleh perempuan.

b. Peran produktif

Berkaitan dengan produksi barang dan jasa untuk konsumsi dan perdagangan. Peran ini berkaitan dengan perolehan pendapatan dan diakui serta dihargai oleh individu ataupun masyarakat sebagai pekerjaan, dan dimasukkan dalam statistik ekonomi nasional. Baik perempuan maupun laki-laki dapat terlibat dalam peran produktif, tetapi fungsi dan tanggung jawab mereka seringkali berbeda. Peran produktif perempuan seringkali kurang terlihat dan kurang dihargai dibandingkan laki-laki.

c. Peran pengelolaan masyarakat/ komunitas

Merupakan aktivitas pada organisasi kolektif seperti pemberian layanan sosial berupa upacara dan perayaan, aktivitas untuk meningkatkan komunitas, partisipasi dalam kelompok dan organisasi, aktivitas politik lokal, dan sebagainya. Jenis pekerjaan ini jarang dipertimbangkan dalam analisis ekonomi, namun memakan banyak waktu yang harus dilakukan secara sukarela dan penting untuk pengembangan spiritual dan budaya masyarakat.

2.1.5.3 Upaya Mengatasi Stereotip Gender

Stereotip menurut Albert Bandura (2023. hlm 216) seorang psikolog Kanada-Amerika, mengembangkan Teori Kognitif Sosial yang memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana perilaku manusia dibentuk melalui interaksi antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Teori ini sangat relevan dalam upaya mengatasi stereotip gender karena menjelaskan bagaimana stereotip terbentuk dan bagaimana kita dapat mengubahnya. Menurut Bandura, individu belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain dan konsekuensinya. Proses ini disebut pembelajaran

observasional atau modeling. Dalam konteks stereotip gender, anak-anak sering mengamati dan meniru perilaku yang dianggap "sesuai" untuk gender mereka dari orang tua, teman sebaya, guru, dan media. Berdasarkan Teori Kognitif Sosial, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi stereotip gender:

a. Pembelajaran *Observasional*

Pembelajaran observasional dalam Teori Kognitif Sosial Bandura menawarkan pendekatan yang kuat untuk mengatasi stereotip gender di masyarakat. Melalui proses ini, individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensinya, yang kemudian dapat mempengaruhi sikap dan tindakan mereka sendiri terkait gender. Dalam upaya mengatasi stereotip gender, pembelajaran observasional dapat dimanfaatkan dengan menampilkan model peran yang menantang stereotip tradisional. Misalnya, media dapat secara sengaja menampilkan wanita dalam peran kepemimpinan di berbagai bidang seperti politik, bisnis, atau sains. Demikian pula, pria dapat ditampilkan dalam peran pengasuhan atau pekerjaan yang secara tradisional dianggap "feminin". Dengan melihat model-model ini secara konsisten, masyarakat mulai memahami bahwa kemampuan dan potensi seseorang tidak ditentukan oleh gender mereka. Institusi pendidikan juga dapat memanfaatkan pembelajaran *observasional* untuk mengatasi stereotip gender. Guru dan staf sekolah dapat memodelkan perilaku dan sikap yang mendukung kesetaraan gender. Mereka dapat mendorong semua siswa, terlepas dari gender mereka, untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik dan ekstrakurikuler. Buku teks dan materi pembelajaran dapat direvisi untuk menampilkan representasi gender yang seimbang dan non-stereotipikal dalam berbagai peran dan profesi.

b. Pengalaman Sosial

Pengalaman sosial dalam Teori Kognitif Sosial Bandura memainkan peran krusial dalam membentuk pemahaman dan perilaku individu terkait gender. Konsep ini menekankan bagaimana interaksi dengan lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman sebaya, institusi pendidikan, dan masyarakat luas, mempengaruhi

pembentukan dan pemeliharaan stereotip gender, serta bagaimana hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasinya. Dalam konteks mengatasi stereotip gender, pengalaman sosial dapat direkayasa untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan dan menantang asumsi tradisional tentang peran gender. Ini dimulai dari unit sosial terkecil, yaitu keluarga. Orang tua dan pengasuh dapat secara sadar menciptakan pengalaman yang mendorong anak-anak untuk mengeksplorasi minat dan kemampuan mereka tanpa batasan gender. Misalnya, anak laki-laki dapat didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan memasak atau merawat tanaman, sementara anak perempuan dapat diajak untuk memperbaiki peralatan atau bermain olahraga yang secara stereotipikal dianggap "maskulin".

c. Determinisme Timbal Balik

Determinisme timbal balik, atau *reciprocal determinism*, adalah konsep kunci dalam Teori Kognitif Sosial Bandura yang menjelaskan interaksi dinamis antara individu, perilaku mereka, dan lingkungan. Dalam konteks mengatasi stereotip gender, konsep ini menawarkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana stereotip terbentuk dan bagaimana mereka dapat diubah. Dalam perspektif determinisme timbal balik, stereotip gender dipandang sebagai hasil dari interaksi terus-menerus antara faktor personal (seperti keyakinan dan sikap individu), faktor perilaku (tindakan yang diambil berdasarkan keyakinan tersebut), dan faktor lingkungan (norma sosial, kebijakan, dan struktur institusional). Untuk mengatasi stereotip gender, intervensi harus menargetkan ketiga aspek ini secara simultan. Pada tingkat personal, upaya dapat difokuskan pada mengubah keyakinan dan sikap individu tentang gender. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan kesadaran bias, dan paparan terhadap model peran yang menantang stereotip. Ketika individu mulai mengubah persepsi mereka, ini akan mempengaruhi perilaku mereka.

d. *Self Efficacy*

Self-efficacy, atau keyakinan seseorang terhadap kemampuan mereka untuk berhasil dalam situasi tertentu, adalah konsep penting dalam Teori Kognitif Sosial Bandura yang dapat memainkan peran krusial dalam mengatasi stereotip gender di

masyarakat. Dalam konteks ini, *self-efficacy* berkaitan dengan keyakinan individu bahwa mereka dapat mengatasi hambatan terkait gender dan berhasil dalam peran atau bidang yang mungkin bertentangan dengan stereotip tradisional. Untuk mengatasi stereotip gender, upaya dapat difokuskan pada meningkatkan *self-efficacy* individu terkait kemampuan mereka untuk berhasil dalam berbagai peran, terlepas dari gender mereka. Ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti memberikan pengalaman keberhasilan dalam tugas-tugas yang menantang stereotip gender, menyediakan model peran yang sukses dari berbagai gender, dan memberikan dorongan verbal yang positif.

e. *Self Regulation*

Self-regulation, atau kemampuan individu untuk mengatur perilaku, pikiran, dan emosi mereka sendiri, merupakan komponen penting dalam teori kognitif sosial Bandura yang dapat berperan signifikan dalam mengatasi stereotip gender di masyarakat. Melalui *self-regulation*, individu dapat secara aktif mengelola respons mereka terhadap stereotip gender dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Dalam konteks mengatasi stereotip gender, *self-regulation* memungkinkan individu untuk mengenali dan menantang pemikiran dan perilaku yang dipengaruhi oleh stereotip gender yang telah terinternalisasi. Misalnya, seseorang dapat menggunakan *self-regulation* untuk mengidentifikasi ketika mereka membuat asumsi berbasis gender, dan secara sadar memilih untuk mengevaluasi situasi berdasarkan fakta dan kemampuan individu, bukan berdasarkan stereotip.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Mulyati, M. (2021) dalam penelitiannya mengkaji peran PKK dalam memberdayakan perempuan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK memiliki peran signifikan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan di desa tersebut. Program-program PKK seperti pelatihan kewirausahaan, pendidikan kesehatan reproduksi, dan literasi keuangan terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi perempuan. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa upaya PKK dalam mengatasi stereotip gender masih terbatas. Meskipun ada peningkatan partisipasi

perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial, persepsi tradisional tentang peran gender masih kuat di masyarakat. Mulyati menemukan bahwa program-program PKK cenderung fokus pada peningkatan keterampilan tanpa secara eksplisit menantang norma-norma gender yang ada. Misalnya, pelatihan kewirausahaan lebih banyak diarahkan pada industri rumahan yang dianggap "cocok" untuk perempuan, seperti katering atau kerajinan tangan, tanpa mendorong partisipasi dalam sektor-sektor yang didominasi laki-laki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun PKK berperan penting dalam pemberdayaan perempuan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada transformasi gender untuk benar-benar mengatasi stereotip gender di masyarakat. Mulyati merekomendasikan agar PKK mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua programnya dan aktif melibatkan laki-laki dalam upaya mengubah persepsi gender di masyarakat.

Susatin, S. (2019) dalam penelitiannya berfokus pada strategi yang digunakan kader PKK dalam mensosialisasikan kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader PKK menggunakan berbagai strategi kreatif dan kontekstual dalam upaya mereka mensosialisasikan kesetaraan gender. Strategi yang paling efektif, menurut temuan Susatin, adalah pendekatan partisipatif dan pelibatan tokoh masyarakat. Kader PKK berhasil mengorganisir diskusi kelompok yang melibatkan baik perempuan maupun laki-laki, di mana peserta didorong untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan dampak stereotip gender dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kader PKK juga aktif melibatkan tokoh agama dan pemimpin adat dalam kegiatan mereka, yang terbukti sangat efektif dalam melegitimasi pesan-pesan kesetaraan gender di mata masyarakat. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penggunaan media kreatif, seperti drama rakyat dan lagu-lagu tradisional yang telah dimodifikasi untuk menyampaikan pesan kesetaraan gender, sangat efektif dalam menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Susatin mencatat bahwa strategi-strategi ini berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang peran gender, terutama di kalangan generasi muda. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan. Resistensi dari kelompok konservatif dan kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah menjadi hambatan utama. Susatin menyimpulkan bahwa meskipun strategi kader PKK

cukup efektif, diperlukan dukungan sistemik yang lebih besar, termasuk kebijakan yang mendukung dan alokasi sumber daya yang memadai, untuk mencapai perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan dalam mengatasi stereotip gender di masyarakat.

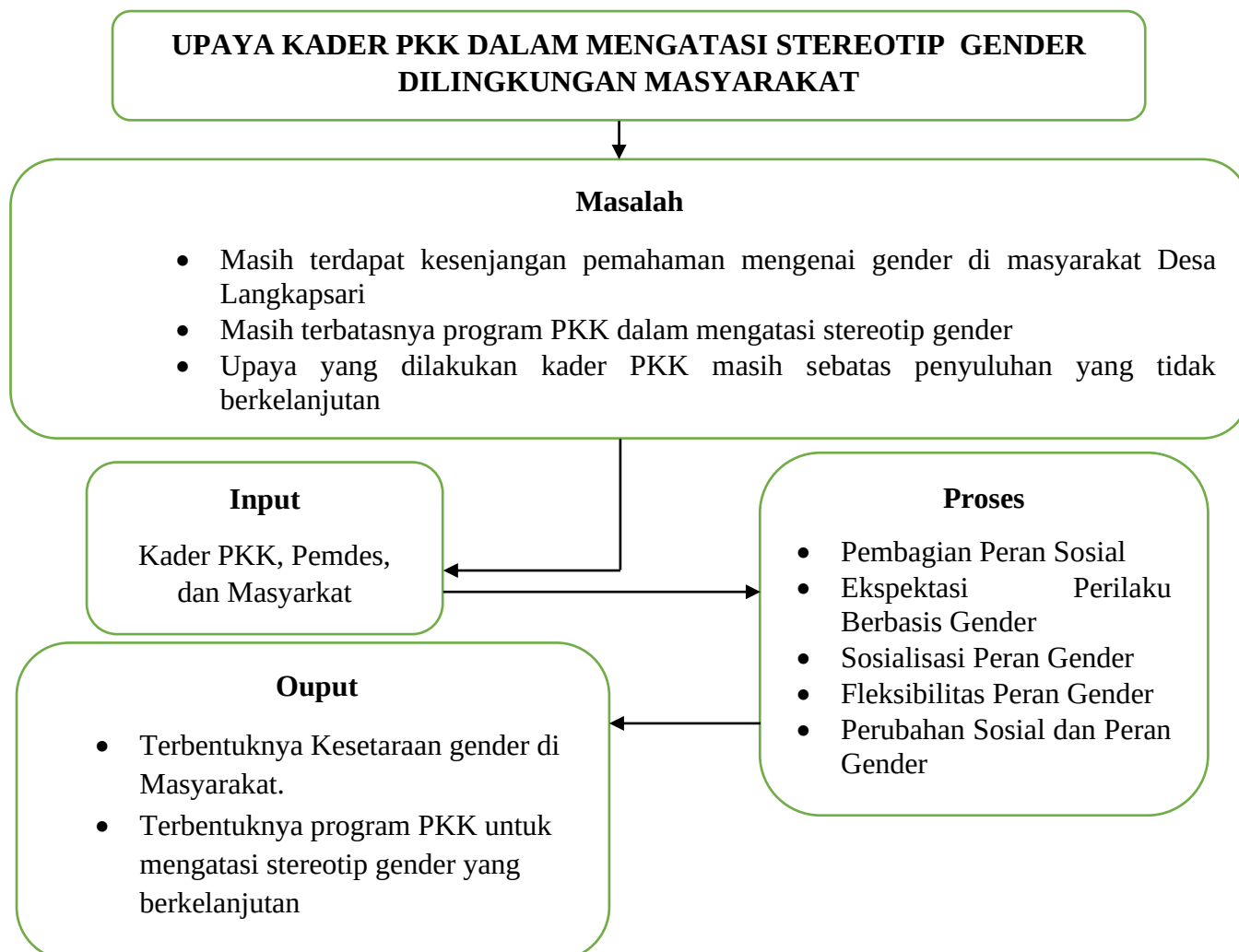
Manalu, Y. (2020) dalam penelitiannya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi PKK dalam mengatasi diskriminasi gender serta peluang yang dapat dimanfaatkan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang kompleksitas upaya mengatasi diskriminasi gender di tingkat akar rumput. Tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah resistensi budaya. Manalu menemukan bahwa norma-norma sosial dan interpretasi agama yang konservatif masih sangat kuat di beberapa komunitas, membuat upaya PKK untuk mempromosikan kesetaraan gender sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang konsep gender di kalangan beberapa kader PKK sendiri juga menjadi hambatan dalam mensosialisasikan ide-ide kesetaraan gender secara efektif. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa peluang signifikan. Dukungan pemerintah kota Surabaya melalui kebijakan dan program yang responsif gender memberikan landasan kuat bagi PKK untuk bekerja. Sari menyimpulkan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, PKK memiliki potensi signifikan untuk menjadi agen perubahan dalam mengatasi diskriminasi gender. Penelitian ini merekomendasikan strategi jangka panjang yang melibatkan pendidikan berkelanjutan untuk kader PKK, kemitraan lintas sektor, dan kampanye kesadaran publik yang inovatif untuk mengoptimalkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan secara efektif.

2.3 Kerangka Konseptual

Definisi kerangka berpikir menurut Wardhana (2015) dalam (Iba & Wardhana, 2023 : 148) merupakan sebuah panduan penting dan mendasar dalam sebuah penelitian yang menggambarkan teori yang relevan untuk hipotesis penelitian serta memberikan kerangka kerja yang terstruktur, sehingga membantu memaksimalkan dalam penelitian. Kerangka konseptual menurut Notoatmodjo dalam (Simanjourang, 2024 : 4) adalah gambaran tentang keterkaitan dan hubungan

antar gagasan atau variabel yang akan dikaji dan dinilai melalui kajian yang akan dilakukan. Masalah dalam penelitian ini yaitu masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai gender di masyarakat Desa Langkapsari, masih terbatasnya program PKK dalam mengatasi stereotip gender, upaya yang dilakukan kader PKK masih sebatas penyuluhan yang tidak berkelanjutan. Lalu input dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Kader PKK, dan juga masyarakat. Proses dalam penelitian ini menggunakan teori peran sosial dan yang terakhir yaitu *output* yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu peningkatan pemahaman mengenai gender pada kader PKK dan terbentuknya program PKK untuk mengatasi stereotip gender.

Kerangka penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Peneliti, 2024

2.4 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan yaitu mengenai: Bagaimana upaya kader PKK di Desa Langkapsari, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis dalam mengatasi stereotip gender di lingkungan masyarakat?.